

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi fokus dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini adalah *Sharia Supervisory Board*, Tata Kelola Pemerintahan dan Pengungkapan CSR pada Lembaga Keuangan Syariah. Objek penelitian yang menjadi variabel bebas (X_1) adalah *Sharia Supervisory Board* serta Tata Kelola Pemerintahan (X_2). Sedangkan yang menjadi variabel terikat (Y) adalah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah.

3.2 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya (Kuntjojo, 2009, hlm. 9). Menurut Sukmadinata (2009, hlm. 31) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian variabel-variabel tersebut dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pengaruh *Sharia Supervisory Board* dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah.

3.2.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Siyoto, S dan Sodik (2015, hlm. 63), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto, S dan Sodik, 2015, hlm. 64). Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan tipe *purposive sampling*. Menurut Syahrums & Salim (2014, hlm. 118), *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Tabel 3. 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Negara yang terdaftar dalam keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam tahun	57
2.	Negara yang tidak terdaftar dalam keanggotaan <i>world bank</i>	0
3.	Negara yang tidak terkonfirmasi memiliki SSB pada level pusat pada bank database zawya	(46)
4.	Negara yang tidak disurvei dalam <i>CSR Disclosure Index</i>	(3)
Sampel		8
Tahun Observasi 2014,2015, 2016, 2017, 2018		5 tahun
Total Observasi		8 x 5 tahun = 40

Terdapat 8 sampel negara yang memenuhi kriteria yang selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Tabel Daftar Negara Yang Dijadikan Sampel

No	Negara
1.	Indonesia
2.	Malaysia
3.	Sudan

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4.	United Arab Emirates
5.	Bangladesh
6.	Pakistan
7.	Bahrain
8.	Oman

Dari hasil yang tersedia maka jumlah populasi adalah 57 negara, dan jumlah negara yang masuk dalam kriteria yaitu sebanyak 8 negara. Tahun observasi adalah 5 tahun. Maka jumlah observasi adalah sebanyak 40 Observasi.

3.2.2 Definisi dan Operasional Variabel

3.2.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau hasil penelitian (Siyoto, S dan Sodik, 2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X_1)

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Siyoto&Sodik, 2015, hlm 52). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Sharia Supervisory Board* (SSB) pada level pusat. SSB merupakan badan hukum independensi yang khusus menilai dari segi fiqih muamalah (hukum komersial islam) yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah (AAOIFI). Di Indonesia SSB pada level pusat diketahui sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pengukuran variabel Sharia Supervisory Board dalam penelitian ini menggunakan skor *Islamic Financial Country Indeks* (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report* (GIFR). Variabel yang terkandung dalam IFCI terdiri dari 8 indikator yaitu *Number Of Islamic Banks, Number Of IBFIS, Shari'a Supervisory Regime, Islamic Financial Assets, Muslim Popilation, Sukuk, Education dan culture dan Islamic regulation/law*.

Skor *Shari'a Supervisory Regime* pada IFCI mewakili skor SSB pada penelitian ini. Bobot untuk *Shari'a Supervisory Regime* pada IFCI adalah sebesar 19,7%. Rentang skor

IFCI adalah 0 sampai dengan 100. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rentang skor

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk *Shari'a Supervisory Regime* adalah minimum 0 sampai dengan maksimum 19,7. Maka untuk memperoleh skor SSB dilakukan dengan mengkalikan bobot *Shari'a Supervisory Regime* dengan skor IFCI.

2. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X_2)

Tata Kelola Pemerintahan menggambarkan cara pelaksanaan kekuasaan dalam mengatur negara untuk pembangunan ekonomi dan sumber daya-sumber daya sosial (*World Bank*). Tata Kelola Pemerintahan diukur menggunakan rata-rata Indeks WGI (*Worldwide Governance Indicators*) yang terdiri dari enam atribut yang meliputi akuntabilitas pemerintahan, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan dan perundang-undangan, serta pengendalian korupsi. Setiap indikator memiliki skor masing-masing yang berkisar antara -2.5 (lemah) hingga +2.5 (kuat). Dalam penelitian ini tata kelola pemerintahan merupakan nilai rata-rata gabungan dari keenam indeks WGI tersebut.

3. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Siyoto&Sodik, 2015, hlm 46). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah. Pengungkapan CSR merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Mathews, 1995 dalam Sudana & Arlindania, 2011). CSR untuk Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memenuhi tanggung jawab agama, ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaannya sebagai perantara.

Pengungkapan CSR LKS dalam penelitian diukur menggunakan *CSR Disclosure Index*. *CSR Disclosure Index* menilai pengungkapan CSR LKS dengan mengumpulkan item-item yang akan dimasukkan sebagai daftar periksa yang perlu dicentang setiap tahun di tingkat kelembagaan lalu kemudian dikumpulkan ke tingkat negara. Item-item pengungkapan dalam *CSR Disclosure Index* terdapat pada tabel 2.1. Negara dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa semakin baik pengungkapan yang dilakukan oleh LKS di negara tersebut dibandingkan negara lain berdasarkan standar yang mengacu pada standar AAOIFI.

3.2.2.2 Operasional Variabel

Menurut Syahrums & Salim (2014, hlm. 108), definisi operasional adalah sebuah batasan-batasan yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel yang diteliti sehingga variabel penelitian dapat diukur. Secara operasional, setiap variabel penelitian dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3 Operasional Variabel

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1.	Variabel Bebas : <i>Sharia Supervisory Board</i> (SSB)	Keberadaan SSB pada tingkat pusat/level makro yang menjaga proses kepatuhan syariah seluruh lembaga keuangan syariah di suatu negara. SSB merupakan badan hukum independensi yang khusus menilai dari segi fiqih muamalah (hukum komersial islam) yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah (AAOIFI)	<i>Islamic Financial Country Index</i> (IFCI) = 19,7% * IFCI Keterangan: 19,7% adalah bobot <i>Shari'a Supervisory Regime</i> dalam skor IFCI	Rasio
2.	Variabel Bebas: Tata Kelola	Cara pelaksanaan kekuasaan dalam mengatur negara untuk pembangunan ekonomi	Rata-rata Indeks WGI (<i>The Worldwide Governance</i>	Rasio

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Pemerintahan	dan sumber daya-sumber daya social (<i>World Bank</i>).	<i>Indicators</i>)	
3.	Variabel Terikat : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Lembaga Keuangan Syariah	Pengungkapan CSR merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Mathews, 1995 dalam Sudana & Arlindania, 2011) CSR untuk Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memenuhi tanggung jawab agama, ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaannya sebagai perantara keuangan bagi individu dan lembaga (AAOIFI, 2010)	<i>CSR Disclosure Index</i>	Rasio

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dan semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari pihak yang diperlukan datanya (Kuntjojo, 2009). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi.

Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skor *Islamic Financial Country Index* (IFCI) dapat dilihat pada *Global Islamic Financial Report* berupa publikasi laporan tahunan.

Untuk mengkonfirmasi keberadaan SSB pada level pusat pada suatu negara diakses melalui situs <https://www.zawya.com/giei/#> dengan menginput nama negara dan tahun pada tampilan map interaktif yang menyediakan data dari berbagai negara. Kemudian, untuk melihat skor SSB pada level pusat suatu negara yang keberadaannya SSBnya telah dikonfirmasi dapat diketahui dengan mengalikan bobot *Sharia Supervisory Regime (19,7%)* dengan skor IFCI masing-masing negara.

2. Data Tata Kelola Pemerintahan diperoleh dari situs database *World Bank* berupa skor *The Worldwide Governance Indicators* (WGI). Data mengenai WGI Indeks berbagai negara diakses melalui laman website <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators/preview/on>
3. Data Pengungkapan CSR LKS masing-masing negara diperoleh dari database Zawya berupa skor *CSR Disclosure Index* dan Laporan *Islamic Financial Development Index* berupa publikasi laporan tahunan. *CSR Disclosure Index* masing-masing negara dapat diakses melalui bank database zawya dalam bentuk interaktif map dengan menginput nama negara dan tahun. Laporan IFDI menyediakan skor CSR beberapa negara yang menduduki peringkat tertinggi dalam *CSR Disclosure Index* dan memuat informasi mengenai tem-item yang menjadi daftar centang dalam pengukuran *CSR Disclosure Index*.

3.2.4 Teknik Analisis Data

3.2.4.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Siyoto, S dan Sodik, 2015, hlm. 111). Teknik ini memberikan gambaran setiap variabelnya yang dapat dilihat dari nilai mean (rata-rata), maksimum – minimum, dan standar deviasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif.

3.2.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal (Nuryadi et al., 2017, hlm. 79). Uji Normalitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa ada sampe dari populasi yang berdistribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Pengujian normalitas residual data penelitian ini menggunakan *one-sample Kolmogorov Smirnow test* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu: jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 (>5%) maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 (<5%) maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel yang dijelaskan dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi karena sebagian variabel yang digunakan saling terkait dalam model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi, nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance* (Kusumah, 2016, hlm. 47). Kriteria yang digunakan yaitu:

- a. Jika nilai VIF di sekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas
- b. Jika nilai *tolerance* ≥ 0.10 , maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Dampak dari heteroskedastisitas dalam model regresi adalah walaupun estimator OLS masih linear dan tidak bias tetapi tidak lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan *perhitungan standard error metode OLS* tidak

bias dipercaya kebenarannya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji glejser, dengan ketentuan:

- a. $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka terjadi homoskedastisitas atau bebas dari gejala heteroskedastisitas.
- b. $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka terjadi heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Menurut Janie (2012, hlm. 30), Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar residual pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Run Test. Uji Run Test merupakan bagian dari pengujian non parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
- b. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

3.2.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Harlan (2018, hlm. 13), Analisis Regresi Linear Berganda (*multiple linear*), adalah model regresi linear dengan satu variabel dependen beserta dua atau lebih variabel independen dan atau kategorik. Teknik analisis yang digunakan dengan metode analisis regresi linear berganda, model pengujian dalam persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + e$$

Dimana :

Y : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah

α : Konstanta

β : Koefisien regresi linear berganda

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

X1 : *Sharia Supervisory Board*

X2 : Tata Kelola Pemerintahan

e : Nilai Residu

3.2.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variasi data variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Setiawan, 2015). Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 0, artinya varians dari Y sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh variabel X. Sementara apabila koefisien determinasi sama dengan 1, artinya varians dari Y dapat diterangkan dengan sempurna oleh X.

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011) uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam Uji F, yaitu:

- a. $F_{hitung} \leq F_{tabel} = H_0$ diterima
- b. $F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak, H_1 diterima

3. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Setiawan, 2015), uji t atau uji parsial merupakan pengujian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebasnya secara parsial terhadap variabel terikatnya yang dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu :

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau profitabilitas lebih kecil atau sama dengan *level of significant* ($Sig < 0.05$), maka H_1 terdukung dan H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau profitabilitas lebih besar dari *level of significant* ($Sig > 0.05$), maka H_1 tidak terdukung dan H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hipotesis penelitian 1: Sharia Supervisory Board Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR LKS

Hipotesis Statistik 1

$H_0 : \beta = 0$ Sharia Supervisory Board Tidak Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR LKS

$H_1 : \beta \neq 0$ Sharia Supervisory Board Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR LKS

Hipotesis penelitian 2: Tata Kelola Pemerintahan Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan CSR LKS

Hipotesis Statistik 2

$H_0 : \beta = 0$ Tata Kelola Pemerintahan Tidak Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR LKS

$H_1 : \beta \neq 0$ Tata Kelola Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan CSR LKS

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian



Gambar 4.1 Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh negara yang terdaftar dalam keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Negara yang terdaftar dalam keanggotaan OKI sampai saat ini adalah sebanyak 57 negara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah menggunakan teknik *purposive sampling* terdapat 46 negara yang tidak memiliki SSB pusat sebagai pengawas pada tingkat makro LKS dinegara tersebut dan 3 negara yang *CSR Disclosure Index*nya tidak tersedia pada bank database zawya, sehingga diperoleh sampel sebanyak 8 negara yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1 Negara yang menjadi Sampel

No	Negara
1.	Indonesia
2.	Malaysia
3.	Sudan
4.	United Arab Emirates
5.	Bangladesh
6.	Pakistan
7.	Bahrain
8.	Oman

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata serta standar deviasi masing-masing data variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi *Sharia Supervisory Board* pada level pusat, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pengungkapan CSR LKS. Berikut adalah tabel statistik deskriptif yang memberikan gambaran dari setiap variabel penelitian.

Tabel 4. 2 Statistik Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sharia Supervisory Board	40	,26	15,96	5,0137	3,99904
Tata Kelola Pemerintahan	40	-1,66	,67	-,3163	,72675
Pengungkapan CSR LKS	40	,71	7,60	3,8355	1,59276
Valid N (listwise)	40				

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum *Sharia Supervisory Board* adalah 0,26 yang diperoleh Negara Oman. Sedangkan nilai maksimum *Sharia Supervisory Board* sebesar 15,96 diperoleh oleh Negara Malaysia pada tahun 2018. Rata-rata skor *Sharia Supervisory Board* seluruh negara adalah 5,0137 dan standar deviasinya 3,99904. Nilai standar deviasi sebesar 3,99904 lebih kecil dibandingkan rata-ratanya sebesar 5,0137 menunjukkan sebaran data yang kecil.

Data pada variabel *Sharia Supervisory Board* dalam penelitian ini berbentuk data kontinyu terbatas dengan rentang skor minimum 0,00 sampai dengan maksimum 19,70. Semakin tinggi skor *Sharia Supervisory Board* maka semakin baik peran keberadaan *Sharia Supervisory Board* pada level pusat disuatu negara. Rata-rata *Sharia Supervisory Board* sebesar 5,0137 menunjukkan bahwa secara umum *Sharia Supervisory Board* pada level pusat di negara-negara OKI memiliki skor yang terbilang cukup rendah karena masih berada dibawah nilai tengah skor IFCI (0 – 19,7) dan lebih mendekati skor minimum.

Nilai minimum Tata Kelola Pemerintahan adalah sebesar -1,66 yang diperoleh Negara Sudan. Nilai maksimum sebesar 0,67 diperoleh oleh Negara Uni Arab Emirates. Nilai rata-rata skor Tata Kelola Pemerintahan adalah sebesar -0,3163 dan standar deviasinya 0,72675. Nilai standar deviasi sebesar 0,72675 lebih besar dibandingkan rata-ratanya sebesar -0,3163. Hal ini mencerminkan beragamnya skor Tata Kelola Pemerintahan yang diperoleh negara-negara anggota OKI yang diukur dengan indeks WGI.

Data pada variabel Tata Kelola Pemerintahan dalam penelitian ini berbentuk data kontinyu terbatas dengan rentang skor minimum -2,5 (Tata Kelola Pemerintahan lemah) sampai

Heni Siti Mariah, 2022
Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

dengan maksimum 2,5 (Tata Kelola Pemerintahan kuat). Nilai rata-rata skor Tata Kelola Pemerintahan sebesar -0,3163 menunjukkan bahwa secara umum Tata Kelola Pemerintahan di negara-negara OKI memiliki skor yang terbilang cukup rendah karena masih berada dibawah nilai tengah indeks WGI (-2,5 – 2,5) dan lebih mendekati skor minimum.

Variabel Pengungkapan CSR LKS menunjukkan nilai minimum 0,71 yang diperoleh Negara Sudan sedangkan nilai maksimum sebesar 7,60 diperoleh Negara Oman. Rata-rata skor Pengungkapan CSR LKS seluruh negara adalah sebesar 3,8355 dengan standar deviasinya 1,59276. Nilai standar deviasi sebesar 1,59276 lebih kecil dibandingkan rata-ratanya sebesar 3,8355 menunjukkan sebaran data yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data dari rata-rata kecil, sehingga nilai rata-rata merupakan nilai representasi yang baik dari keseluruhan data.

Data pada variabel Pengungkapan CSR LKS ini dalam penelitian ini berbentuk data kontinyu terbatas dengan rentang skor minimum 0.00 sampai dengan maksimum 11.00. Nilai rata-rata skor Pengungkapan CSR LKS sebesar 3,8355 menunjukkan bahwa secara umum Pengungkapan CSR LKS di negara-negara OKI memiliki skor yang terbilang cukup rendah karena masih berada dibawah nilai tengah (0.00-11.00) dan lebih mendekati skor minimum.

4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa ada sampel dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas residual data penelitian ini menggunakan *one-sample Kolmogorov Smirnow test* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu: jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (>5%) maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,31696269

Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,072
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian yang diperoleh dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 mengartikan bahwa uji normalitas dengan *one-sample kolmogorov test* (K-S) terpenuhi, karena nilainya lebih besar dari 0,05.

4.1.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji korelasi antar variabel yang dijelaskan dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi karena sebagian variabel yang digunakan saling terkait dalam model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi, nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance* (Kusumah, 2016, hlm. 47). Kriteria yang digunakan yaitu:

- Jika nilai VIF di sekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas
- Jika nilai tolerance ≥ 0.10 , maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sharia Supervisory Board	,782	1,279
Tata Kelola Pemerintahan	,782	1,279

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR LKS

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 menunjukkan variabel dengan masing-masing nilai tolerance >0,1 dan VIP <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.1.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji glejser, dengan ketentuan jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,278	,245		5,206	,000
Sharia Supervisory Board	-,025	,035	-,125	-,704	,486
Tata Kelola Pemerintahan	,365	,194	,334	1,881	,068

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Hasil uji heteroskedastisitas dalam tabel menunjukkan nilai signifikansi 0,486 untuk variabel Sharia Supervisory Board dan nilai signifikansi 0,068 untuk variabel Tata Kelola Pemerintahan. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini

4.1.2.2.4 Hasil Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat nilai yang berkorelasi satu dengan yang lainnya dalam satu variabel. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Run test dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- c. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
- d. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	,14697
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	22
Z	,160
Asymp. Sig. (2-tailed)	,873
a. Median	

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,873 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi pada penelitian ini.

4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Harlan (2018, hlm. 13), Analisis Regresi Linear Berganda (*multiple linear*), adalah model regresi linear dengan satu variabel dependen beserta dua atau lebih variabel independen dan atau kategorik. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.7 Ringkasan Model

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,562 ^a	,316	,279	1,35209
a. Predictors: (Constant), Tata Kelola Pemerintahan, Sharia Supervisory Board				

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Tabel 4.7 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,316 atau 31,6%. Hal ini mengartikan bahwa Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah di suatu negara dipengaruhi oleh variabel *Sharia Supervisory Board* dan Tata Kelola Pemerintahan 31,6%. Sementara sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 4. 8 ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31,298	2	15,649	8,560	,001 ^b
	Residual	67,641	37	1,828		
	Total	98,939	39			

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR LKS
b. Predictors: (Constant), Tata Kelola Pemerintahan, Sharia Supervisory Board

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai F Hitung yang diperoleh adalah sebesar 8,560 dengan tingkat signifikansi 0,01. Karena nilai F hitung 8,940 lebih besar dari F Tabel 2,84, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel *Sharia Supervisory Board* dan Tata Kelola Pemerintahan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah.

Tabel 4. 9 Koefisien Regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	5,160	,426		12,102	,000
	Sharia Supervisory Board	-,180	,061	-,453	-2,947	,006
	Tata Kelola Pemerintahan	1,329	,337	,606	3,944	,000

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR LKS

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Tabel 4.9 digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah. Nilai Koefisien *Sharia Supervisory Board* (SSB) adalah sebesar -0,180 dengan tingkat signifikansi 0,006 dan nilai koefisien variabel Tata Kelola Pemerintahan (TKP) adalah sebesar 1,329 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Sharia Supervisory Board* berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Begitupula untuk

variabel Tata Kelola Pemerintahan juga berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah karena memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Dari tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,160 - 0,180SSB + 3,059TKP + e$$

4.1.4 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian yaitu terdapat dalam Bab 1. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu apakah *Sharia Supervisory Board* mempengaruhi Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah dan apakah Tata Kelola Pemerintahan mempengaruhi Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah

4.1.4.1 Pengaruh *Sharia Supervisory Board* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Sharia Supervisory Board* (SSB) pada level pusat terhadap Pengungkapan CSR LKS pada Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam pada Tahun 2014-2018. SSB adalah badan hukum independensi yang khusus menilai dari segi fiqih muamalah (hukum komersial islam) yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah (AAOIFI). Keberadaan SSB berfungsi untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa LKS patuh pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman dan Bukair (2013), SSB dapat berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR. Keberadaan SSB diklaim dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan Lembaga Keuangan Syariah sehingga mengarah pada penyediaan lebih banyak informasi tentang usaha sosial perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 25 mengenai Pengaruh SSB terhadap Pengungkapan CSR LKS menunjukkan bahwa keberadaan SSB berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR LKS pada suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisiensi sebesar -0,353 dengan tingkat signifikansi 0,00. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan SSB pada level pusat yang diukur menggunakan skor IFCI memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan CSR LKS pada suatu negara. Karena nilai koefisiennya negatif yaitu sebesar -0,353 dapat diketahui bahwa keberadaan SSB pada level pusat

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki pengaruh negatif terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Violita (2020), Rahman & Bukair (2013), Nawal Hussein Abbas El Hussein (2018), Farook, Hassan & Lanis (2011)

Semakin tinggi skor SSB pusat yang diukur menggunakan skor IFCI membuat Pengungkapan CSR LKS yang diukur menggunakan *CSR Disclosure Index* di negara tersebut menjadi semakin menurun. Artinya, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan dan pemantauan Lembaga Keuangan Syariah oleh SSB pada tingkat pusat tidak mendorong perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan lebih banyak informasi tentang usaha sosialnya.

Alasan Lembaga Keuangan Syariah tidak terdorong untuk menyediakan lebih banyak informasi tentang usaha sosialnya dapat disebabkan karena fungsi utama dari SSB pada level pusat lebih menekankan pada harmonisasi dan standardisasi seluruh LKS dalam suatu negara melalui fatwa, bimbingan dan nasihat, seperti yang tercermin dalam tugas dan wewenang DSN-MUI. Selain itu, Fatwa dari DSN-MUI baru bersifat mengikat terhadap Lembaga Keuangan Syariah apabila telah dituangkan kedalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

4.1.4.2 Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah pada Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam pada Tahun 2014-2018. Tata Kelola pemerintahan yang baik dipercaya dapat meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pengungkapan CSR. Dalam penelitian Villiers et al. (2015) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR lebih informatif di negara-negara di mana investor berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyuarakan *concern* mereka dan di mana terdapat regulasi yang lebih baik dan implementasi peraturan pemerintah yang lebih efektif.

Mengingat peran penting pemerintah selaku regulator yang dapat mendorong setiap perusahaan untuk mengikuti regulasi yang diberikan oleh pemerintah di negara tersebut, maka penting untuk memperhatikan kualitas Tata Kelola Pemerintahan agar perusahaan mau

Heni Siti Mariah, 2022

Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memperhitungkan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah social kemasyarakatan (*stakeholder orientation*) yang ditunjukkan dengan pengungkapan CSR pada laporan tahunannya.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 25 mengenai pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pengungkapan CSR LKS menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR LKS. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 3,059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak karena berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang diukur menggunakan Indeks WGI memiliki pengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR LKS suatu negara. Semakin tinggi Indeks WGI suatu negara, maka Pengungkapan CSR LKS negara tersebut menjadi semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa *Stakeholder* pada dasarnya memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi perusahaan. Sehingga perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leuz et.al (2003), dan (Cahan et al., 2015), (Miniaoui, 2019).